KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : UMKM Bakal Sulit Bersaing: Praktik Predatory Pricing di Pasar Digital
Tanggal : Jumat, 06 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Praktik Predatory Pricing Di Pasar Digital

UMKM Bakal Sulit Bersaing

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto meminta Pemerintah segera menertibkan pelaku usaha yang melakukan praktik *predatory pricing* atau merusak harga pasar dalam perdagangan digital. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dirugikan dengan praktik jual murah ini.

Darmadi Durianto

DARMADI bilang, dia banya menerima keluhan dari pelaku UMKM soal adanya produsen yang menjual produknya dengan harga jauh di bawah pasaran. Praktik predatory pricing ini bisa membuat pasar tidak kondusif.

"Praktik predatory pricing itu juga mengindikasikan adanya dugaan persekongkolan yang cukup kuat antara produsen dengan *e-commerce* selaku pemilik *platform* digital," kata Darmadi di Jakarta, kemarin.

Darmadi mengingatkan, praktik ilegal ini dapat mematikan pelaku usaha UMKM, sehingga berimbas kepada Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

"Bayangkan berapa banyak karyawan yang akan di-PHK akibat dari kegiatan persaingan yang tidak sehat ini," katanya.

Selain itu, sambung Bendahara Megawati Institute ini, praktik predatory pricing ini juga dapat menyebabkan rantai distribusi menjadi terganggu, sehingga dapat merusak ekosistem perekonomian.

"Praktik ini mereka samarkan dengan kedok menggunakan berbagai program promosi dan bebas ongkir," urai Darmadi.

Politisi PDIP ini mendesak Pemerintah agar mengawasi ketat platform e-commerce dan menindak tegas mereka yang terindikasi menjual harga barang jauh di bawah harga pasar.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kudu segera bertindak dan melakukan investigasi atas dugaan predatory pricing di e-commerce ini.

"Pemerintah jangan biarkan praktik usaha semacam ini karena negara kita tidak menganut konsep ekonomi pasar bebas. Mereka disokong kekuatan kapital yang tak terbatas. UMKM kita nggak akan mampu bersaing dengan mereka," jelasnya.

Darmadi mengaku, praktik predatory pricing banyak terjadi di pasar elektronik dengan nilai transaksi cukup besar. Pemerintah perlu membuat pengaturan terkait batas atas subsidi maupun skema diskon. Peraturan tersebut dapat berupa larangan bagi produsen untuk mensubsidi lebih dari 2,5 persen.

"Subsidi melebihi persentase itu membuat banyak para pelaku UMKM elektronik mengeluh, lantaran produsen dan pabrik menjual langsung ke konsumen. Pun dengan diskon platform juga sebaiknya diatur layaknya aturan bunga bank," jelasnya.

Terakhir, Darmadi kembali menegaskan, prinsip kegotongroyongan dalam menjalankan perekonomian harus dijadikan alat ukur utama oleh bangsa dan negara. Bukan malah menciptakan *gap* yang akhirnya makin menyuburkan kapitalisme.

"Jangan biarkan kapitalisme tumbuh subur di negeri ini. Karena selain merusak prinsip ekonomi kapitalisme, juga seolah meludahi independensi negara sebagai pengatur tata kelola perekonomian yang bernapaskan prinsip ekonomi Pancasila," pungkasnya. ■ KAL